

PERUBAHAN – APBD – TAHUN 2014

2014

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 7. LD. 2014/NO. 7. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
28 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

ABSTRAK

- Dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun anggaran 2014, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih pada perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014.
- Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 69 Tahun

1992 tentang Perubahan Batas Wilayah II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Perda Propinsi Jawa Tengah No. 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2004 tentang Daerah Aneka Usaha, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kota Salatiga,

Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor pelayanan dan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Kota Salatiga No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah badan kredit kecamatan sidorejo, perseroan terbatas pusat rekreasi dan promosi pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2014, yang dituangkan dalam angka-angka yang jelas sebagai landasan operasional pelaksanaan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2014